



**SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG
BAGIAN ANGGARAN 005.04**



UAKPA

005.04.1600.652081

**PENGADILAN AGAMA BONTANG
Untuk Periode yang Berakhir 30 juni 2025**

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001
Website: <https://pa-bontang.go.id> e-
mail : pa-bontang@pta-samarinda.net
Bontang Kalimantan Timur 75313



LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(005.04.1600.652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode
Semester I Tahun 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04.1600.652081
Dirjen Badan Peradilan Agama
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEMESTER I

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001 Website: <https://pa-bontang.go.id>
e-mail : pa-bontang@pta-samarinda.net
Bontang Kalimantan Timur 75313

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.


Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bontang, 30 Juni 2025
Sekretaris,


Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP.1985011702006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
A. PENJELASAN UMUM	5
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.402480) Pengadilan Agama Bontang	5
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3. Basis Akuntansi	7
A.4. Dasar Pengukuran	7
A.5. Kebijakan Akuntansi	8
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1. Pendapatan	12
B.2. Belanja	13
B.3. Belanja Pegawai	14
B.4. Belanja Barang	14
B.5. Belanja Modal	15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	18
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	18
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	18
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	18
C.4. Piutang PNB	19
C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	19
C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	19
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar	19
C.8. Belanja Dibayar di Muka	20
C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	20
C.10. Persediaan	20
C.11. Persediaan yang Belum Diregister	21
C.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	21
C.13. Tagihan Penjualan Angsuran	21
C.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	21
C.15. Tanah	22
C.16. Peralatan dan Mesin	22
C.17. Gedung dan Bangunan	23
C.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23
C.19. Aset Tetap Lainnya	24
C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	24
C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
C.22. Aset Tak Berwujud	25
C.23. Aset Lain-Lain	25
C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	25

C.25.	Uang Muka dari KPPN.....	26
C.26.	Utang kepada Pihak Ketiga	26
C.27.	Hibah Yang Belum Disahkan	26
C.28.	Pendapatan Yang Ditangguhkan.....	26
C.29.	Pendapatan Diterima Dimuka	26
C.30.	Ekuitas.....	27
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	27
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	27
D.2.	Beban Pegawai.....	27
D.3.	Beban Persediaan.....	28
D.4.	Beban Barang dan Jasa	28
D.5.	Beban Pemeliharaan	28
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	29
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	29
D.8.	Beban Bantuan Sosial	29
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	30
D.11.	Pos Luar Biasa.....	30
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	31
E.1.	Ekuitas Awal	31
E.2.	Surplus (Defisit) LO	31
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	31
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	32
E.5.	Ekuitas Akhir.....	32
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	34
F.1.	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	34
F.2.	Pengungkapan Lain-Lain	34
G.	Pengungkapan Capaian Rincian Output	
G.1	Pengungkapan Capaian Rincian Output per Fungsi APBN	35
	LAMPIRAN DAN DAFTAR	35

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001 Website: <https://pa-bontang.go.id>

e-mail : pa-bontang@pta-samarinda.net

Bontang Kalimantan Timur 75313

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bontang, 30 Juni 2025

Sekretaris,


Yuri Adi Dharma, S.Kom

NIP.1985011702006041001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang Samarinda Tahun 2021 SEMESTER ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 SEMESTER adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 50,911,500,00 atau mencapai 78 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 65,530,000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 SEMESTER adalah sebesar Rp 73,482,000.00 atau mencapai 100,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 73,482,000.00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Sehingga Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 2,938,500,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 32,200,000,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp (24,650,500,00) dari Kegiatan Operasional senilai Rp 75,562,000,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar RpRp0,00,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(24,650,500,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (24,650,500) Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (24,650,500,00) Kenaikan /Penurunan Ekuitas sebesar Rp.0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2025 SEMESTER I disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.04.1600.652081)

PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN 2025 SEMESTER II DAN TAHUN 2024 SEMESTER I

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025				2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	65,530,000	50,911,500	(14,618,500)	78	53,448,000	64,269,500	(10,821,500)	(10,821,500)
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	65,530,000	50,911,500	(14,618,500)	78	53,448,000	64,269,500	(10,821,500)	12
B	BELANJA								
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	73,482,000	73,482,000	0	10	62,000,000	62,000,000	0	10
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	73,482,000	73,482,000	0	10	62,000,000	62,000,000	0	10
C	PEMBIAYAAN				0				0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.04.1600.652081)
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NERACA

PER 30 Januari 2025 DAN 31 Juni 2024
(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	0		0
JUMLAH ASET LANCAR	0	0		0
ASET TETAP				
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0			0
Gedung dan Bangunan				0
Aset Tetap Lainnya				0
KUMULASI PENYUSUTAN				0
JUMLAH ASET TETAP				0
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud			0	0
Aset Lain-lain			0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA			0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0	0
JUMLAH ASET		0	0	0
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga		0		0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				0
JUMLAH KEWAJIBAN				0
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas				0
JUMLAH EKUITAS				0
JUMLAH EKUITAS				0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.04.1600.652081)
PENGADILAN AGAMA BONTANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Januari 2025 DAN 31 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

LAPORAN OPERASIONAL

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	50,911,500	64,269,500	(13,358,000)	(20.784)
Jumlah Negara Bukan Pajak	50,911,500	64,269,500	(13,358,000)	(20.784)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Penempatan Hibah	50,911,500	64,269,500	(13,358,000)	(20.784)
Jumlah Pendapatan	(3.476.722.113)	685,073,775	155,808,851	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	4,000,000	3,267,910	732,090	22.402
Beban Barang dan Jasa	50,250,000	50,000,000	250,000	0.5
Beban Pemeliharaan	0	0	0	(2.261)
Beban Perjalanan Dinas	21,312,000	21,312,000	11,112,000	108.941
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ pemda	0	0	0	
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban bantuan Sosial	0	0	0	
Beban penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Tranfer Daerah	0	0	0	
Beban Lainnya	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	75,562,000	63,467,910	12,094,090	19.055
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN PERASIONAL	(24,650,500)	801,590	(25,452,090)	(3,175.201)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar Surplus/Defisit	0	0	0	
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pendapatan	0	0	0	
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(24,650,500)	801,590	(25,452,090)	(3,175.201)
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(24,650,500)	801,590	(25,452,090)	(3,175.201)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.04.1600.652081)

PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0		
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24,650,500)	801,590	(25,452,090)	(3,175.2)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	24,650,500	(801,590)	25,452,090	(3,175.2)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0		
EKUITAS AKHIR	0	0		

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 657/SEK/SK/X/2018. Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long No 69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur 75313

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

- Misi Mahkamah Agung:
 - 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
- Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Bontang sebagai Visi dan Misinya.
- Visi Pengadilan Agama Bontang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Yang Agung”.
- Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI (2010-2035) dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :
 - 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
 - 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
 - 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
 - 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
 - 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
 - 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
 - 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
 - 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
 - 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.
- Misi Pengadilan Agama Bontang adalah :
 - 1) Menjaga kemandirian Peradilan Agama Bontang ;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang ;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang ;
 - Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bontang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - 1) Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Agama Bontang yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
 - 2) Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Bontang dalam wilayah hukumnya;
 - 3) Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Bontang dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.
 - Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut :
 - 1) Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Agama Bontang satu tahun ke depan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
 - 2) Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang.

Tujuan dan Sasaran Strategis PA Bontang

No	Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis pengadilan Agama Bontang yang berfokus pada skala Prioritas strategic
2	Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Bontang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan
3	Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 SEMESTER I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

A.5.1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan- LRA
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
 - Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2. Pendapatan-LO

- Pendapatan- LO
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.3. Belanja

- Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4. *Beban*

- Beban
- **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - **Beban** diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - **Beban** disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5. *Aset*

- Aset
- **Aset** diklasifikasikan menjadi **Aset Lancar**, **Aset Tetap**, **Piutang Jangka Panjang** dan **Aset Lainnya**.

Aset Lancar (1) *Aset Lancar*

- **Kas** disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. **Kas** dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- **Investasi Jangka Pendek BLU** dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- **Piutang** diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) **Piutang** yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) **Piutang** yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- **Piutang** disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh Tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap (2) *Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap (3) *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Tahun selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

(4) *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

(5) *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.5.6. Kewajiban

- Kewajiban
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 1) Kewajiban Jangka Pendek**
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang**
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Ekuitas

Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, bahwa revisi DIPA telah dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2025	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	65,530,000	65,530,000
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	73,482,000	73,482,000
Belanja Modal	0	0
Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid19	0	0
Jumlah Belanja	73,482,000	73,482,000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp. 65,530,000 00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp65,530,000,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 65,530,000,00. Rincian pendapatan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Juni 2025		% Real Angg.
	Estimasi	Realisasi	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 SEMESTER I mengalami penurunan sebesar (33)persen dibandingkan Tahun 2024 SEMESTER I yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	0	0	0

3.2.2 Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp.73,482,000,00

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2025 SEMESTER I adalah sebesar Rp.73,482,000,00 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp.73,482,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 SEMESTER I adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 SEMESTER I

Uraian	30 Juni 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	73,482,000,00	73,482,000,00	100
Belanja Modal			00
Total Belanja Kotor	73,482,000,00	73,482,000,00	100
Pengembalian			10
Jumlah	73,482,000,00	73,482,000,00	100

Dibandingkan dengan Tahun 2024 SEMESTER I, Realisasi Belanja Tahun 2025 SEMESTER I tidak mengalami kenaikan sebesar 15% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2022 SEMESTER I.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	31 Juni 2025	31 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	10	0
Belanja Barang	73,482,000,00	62,000,000	15
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	73,482,000,00	62,000,000	15

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2025 SEMESTER I mengalami kenaikan sebesar 0 persen dari Tahun 2024 SEMESTER I.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp 73,482,000,00

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp 73,482,000,00 dan Rp 62,000,000. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 SEMESTER I mengalami kenaikan sebesar 15% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 SEMESTER I. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang non operasional dan belanja pemeliharaan sepanjang Tahun 2025 SEMESTER I.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	600.000	(100)
Belanja Barang Persediaan	1,920,000	1,790,000	(20)
Belanja Jasa	50,250,000	50,000,000	(3,44)
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21,312,000	9,600,000	11
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	73,482,000	61,390,000	15,80
Pengembalian Belanja	-	0	
Jumlah Belanja	73,482,000	61,390,000	15,80

Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Tahun 2025 SEMESTER I tidak mengalami perubahan sebesar 0 persen dibandingkan Tahun 2024 SEMESTER I.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tana	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 SEMESTER I adalah sebesar Rp0 atau mengalami penurunan sebesar 0 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 SEMESTER I sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	31 Juni 2025	31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 SEMESTER I tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2024 SEMESTER I.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 SEMESTER I tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2024 SEMESTER I.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp0,00,*

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 SEMESTER I tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2024 SEMESTER I. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal lainnya selama Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I.

*Belanja Bantuan Sosial
Rp0,00*

B.5.1. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahun 2025 SEMESTER I tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2024 SEMESTER I. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja bantuan sosial selama Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Rekening Bank		
Uang Tunai		
Kuitansi UP		
Jumlah		

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Uang Tunai		
Rekening Bank		
Jumlah		

3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dari Hibah		
Jumlah		

4.4. Piutang PNBP

Piutang PNBP
Rp0,00

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Piutang PNBP		
Piutang Lainnya		
Jumlah		

4.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

No	Nama	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	NIHIL		
	Jumlah		

4.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian
Lancar TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

No	Nama	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	NIHIL		
	Jumlah		

4.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

8.8. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar
di Muka Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Pembayaran Domain dan Hosting		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah		

8.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
NIHIL		
Jumlah		
Selisih dengan Neraca	-	-

8.10. Persediaan

Persediaan
Rp 1.920.000,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.750.000,00 dan Rp 3.267.910,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Jenis	30 Juni 2025	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	1.750.000	3.267.910
Barang untuk Pemeliharaan	-	
Bahan Baku	-	
Jumlah	1.750.000	3.267.910

Sampai dengan periode yang berakhir per 30 Juni 2025, seluruh pencatatan bahan/barang persediaan dikelompokkan ke dalam barang konsumsi dan barang persediaan untuk pemeliharaan dan berdasarkan hasil opname fisik dinyatakan bahwa semua barang persediaan dalam kondisi baik.

11. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister
Rp0,00

Saldo Persediaan yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan yang Belum Diregister muncul akibat satuan kerja belum melakukan penyelesaian melalui transaksi GUP atas pembelian barang-barang persediaan.

12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

N	Debitur	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	NIHIL		
	Jumlah		

13. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

No	Debitur	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	NIHIL	0	0
2		0	0
3		0	0
	Jumlah	0	0

14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

15. Tanah

Tanah
Rp 0,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja di wilayah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0
Mutasi tambah:	0
Hibah Masuk	0
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	0
Akumulasi Penyusutan	0
Saldo per 30 Juni 2024	0

16. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp 0,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transaksi Normalisasi BMN	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Transfer Keluar	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0)

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang untuk aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

17. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Saldo Awal	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Atas aset jalan, irigasi dan jaringan ini dengan mengacu pada hasil kesepakatan dan kebijakan dari Mahkamah Agung RI bahwa untuk setiap aset berupa jalan, jembatan, jaringan dan irigasi untuk yang instalasinya melekat pada gedung agar diakui sebagai aset gedung dan bangunan mengingat aset jalan, jembatan, jaringan dan irigasi bukan merupakan aset yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan, maka seharusnya di seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur sudah tidak ada lagi yang memiliki aset ini.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0

19. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp 0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

22
Aset Tak Berwujud
Rp. 00,00

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp 0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud salah satunya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	0
Mutasi tambah:	0
Software	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0

23
Aset Lain-Lain
Rp0,00

Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2022	0
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

24
Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tidak Berwujud			
2	Aset Lain-Lain			
3	Aset Tak Berwujud Lainnya			
	Akumulasi Penyusutan	0	0	

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.25.
Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Seluruh Uang Muka dari KPPN ini per 30 Juni 2025 telah selesai dilakukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Nihil.

C.26.
Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 0,00

Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan bahwa Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa uang makan Desember sedangkan Belanja Barang yang Masih Dibayar berupa tagihan listrik, air, telpon dan pos. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	0	
Total	0	

C.27.
Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0,00

Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hibah yang belum disahkan merupakan hibah yang sampai dengan tanggal pelaporan sudah diterima dan dicatat oleh satuan kerja pemerintah namun proses registrasinya masih dalam proses pengajuan dan pengesahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.

C.28.
Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp0,00

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.29.
Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00

Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

3.0. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp 50,911,500,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 50,911,500,00 dan Rp 64,269,500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN	(Turun)%		
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	50,911,500	64,269,500	(20.784)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0
Pendapatan PNBP	50,911,500	64,269,500	(20.784)

Terhadap pendapatan yang diperoleh dalam laporan operasional ini, diperoleh dari total pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditambah Pendapatan non kas dan piutang atau pendapatan ditangguhkan dikurangi dengan Pendapatan dibayar di muka.

1.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 0

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN JENIS BEBAN			Naik (Turun)%
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	0	0	0

0.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp 4,000,000,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp 4,000,000,00 dan Rp 3,267,910,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	4,000,000	3,267,910	22.402
beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan barang hasil sitaan	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	4,000,000	3,267,910	22.402

0.4.

Beban Barang dan
Jasa
Rp 50,250,000,00

Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2023 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp 50,250,000,00 dan Rp 50,000,000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2025 SEMESTER I, Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 SEMESTER I mengalami kenaikan sebesar 0.5%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2025 SEMESTER I. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Beban Jasa Konsultan	50,250,000	50,000,000	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	
Jumlah	50,250,000	50,000,000	

0.5.

Beban
Pemeliharaan
Rp 0,00

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian

beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan
Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I**

Beban Barang Non Operasional - Darurat Bencana	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Operasional	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Jumlah	0	0	0

0.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp 21,312,000,00*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp 21,312,000,00 dan Rp 10,200,000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan daerah dan surveillance ZI dan APM. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I**

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Dinas Biasa <i>Konsultasi</i>	0	0	0)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	21,312,000	10,200,000	108.941
Jumlah	21,312,000	10,200,000	108.941

0.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.04.1600.652081) Pengadilan Agama Bontang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

0.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 SEMESTER dan Tahun 2022 SEMESTER adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTIASI	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK/TURUN %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0

D.10.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.11 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa RpRp0,00,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER I

URAIAN			
	0	0	0
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0
Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga	0	0	0
Beban Tanggapan Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.0,00 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit-LO
Rp (24,650,500),00 Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER adalah sebesar Rp (24,650,500.00) dan 801,590,00. Defisit- LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

E.3.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3.1. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,00 Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk Tahun 2025 SEMESTER dan Tahun 2024 SEMESTER adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2025 SEMESTER adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp000.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 30 Juni 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021 SEMESTER I

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi terjadi di satuan kerja terhadap asset-asset yang tercatat dalam kelompok asset yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI namun hanya perubahan nama dan kodifikasi asetnya dan tidak merubah nilainya.

E.3.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 SEMESTER I dan Tahun 2024 SEMESTER I adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0
SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0
Penyesuaian SAL BLU	0
Jumlah	0

Keluar
Rp 0,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Kegiatan Transaksi Antar entitas yakni Tranfer masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Keluar/Transfer Masuk Per Satker

No	Kode	Uraian	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk
1	-	-	0	-	-	0
		JUMLAH	0		JUMLAH	0

E.4.1.
Pengesahan Hibah
Langsung Langsung
Rp 0,00

E.4.1. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 yang diterima sepanjang 2025.

Ekuitas Akhir
Rp 0,00

E.5.

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Kejadian-Kejadian
Penting Setelah
Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

Pengungkapan Lain-
Lain

Pengungkapan atas pelaksanaan program penanganan pandemi COVID-19 yaitu:

1. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0.000 atau 0% dari anggaran sebesar Rp 0 berupapengadaan APD dan Rapid Test
- 2 Terdapat Jurnal Penyesuaian Beban Yang Masih Harus Dibayar yaitu:
 1. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Bulan Desember 2025 sebesar Rp 0
 2. Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2025 sebesar Rp 0
 3. Beban Langganan Air Bulan Desember 2025 sebesar Rp 0
 4. Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2025 sebesar Rp 0
 5. Beban Keperluan Perkantoran Belanja Barang Jasa Langganan Internet Bulan Desember 2025 sebesar Rp 0

G. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

G.1 Pengungkapan Capaian Rincian Output per Fungsi APBN

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari mana pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker **paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.**

Pengadilan Agama yakni Satker 652081 Dirjen Peradilan Agama telah melakukan Pelaporan tepat waktu sejak awal tahun 2025 hingga Desember 2025 sehingga nilai Capaian OutPut atau capaian Kinerja satker 652081 Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah mencapai 100%. dengan Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) mencapai nilai 95.63 % Dari dua kategori yaitu capaian output pelaksanaan Kegiatan Prodeo dengan Volume 16 Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan Pos Bantuan Hukum dengan Volume 500 jam Layana

Pengungkapan Capaian Rincian Output per Fungsi APB

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai total /Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	046	005	652081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	Nilai	100.00	79.32	100.00	100.00	91.67	0.00	100.00	86.07		0.00	95.63
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.90	20.00	10.00	9.17	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.66		97.22				100.00				

LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 30/07/25 1:10 PM

Tgl Cetak : 30/07/25 3:50 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	35,138,500	25,613,000	9,525,500	37.19
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	35,138,500	25,613,000	9,525,500	37.19
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	35,138,500	25,613,000	9,525,500	37.19
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	6,000,000	4,000,000	2,000,000	50
Beban Barang dan Jasa	26,200,000	25,125,000	1,075,000	4.279
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	21,312,000	(21,312,000)	(100)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 30/07/25 1:10 PM

Tgl Cetak : 30/07/25 3:50 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	32,200,000	50,437,000	(18,237,000)	(36.158)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,938,500	(24,824,000)	27,762,500	(111.837)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2,938,500	(24,824,000)	27,762,500	(111.837)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,938,500	(24,824,000)	27,762,500	(111.837)

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 30 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652081

Tgl Data : 30/07/25 1:10 PM
Tgl Cetak : 30/07/25 3:51 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	62,000,000	32,200,000	(29,800,000)	51.94	73,482,000	48,357,000	(25,125,000)	65.81
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 30 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 30/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 30/07/25 3:50 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,639,533,643	7,294,348,434	345,185,209	4.73
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,947,707,789)	(1,928,578,877)	(19,128,912)	0.99
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	477,064,714	0	477,064,714	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	477,064,714	0	477,064,714	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,772,313,480	1,651,569,141	120,744,339	7.31
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	301,670,405	(277,009,736)	578,680,141	(208.9)
EKUITAS AKHIR	7,941,204,048	7,017,338,698	923,865,350	13.17

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

NIP 198501172006041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 30/07/25 1:10 PM

Tgl Cetak : 30/07/25 3:52 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	10,264,700	0	10,264,700	0.00
Persediaan	1,935,840	0	1,935,840	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	12,200,540	0	12,200,540	
JUMLAH ASET	12,200,540	0	12,200,540	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,264,700	0	10,264,700	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,264,700	0	10,264,700	
JUMLAH KEWAJIBAN	10,264,700	0	10,264,700	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,935,840	0	1,935,840	0.00
JUMLAH EKUITAS	1,935,840	0	1,935,840	
JUMLAH EKUITAS	1,935,840	0	1,935,840	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,200,540	0	12,200,540	

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 30/07/25 1:10 PM

Tgl Cetak : 30/07/25 3:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	10,264,700	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,935,840	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	10,264,700
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	32,200,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	35,138,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,935,840
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,340,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	10,115,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	20,683,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	25,300,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,000,000	0
JUMLAH			79,539,040	79,539,040

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

NIP 198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 30/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 30/07/25 3:54 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	32,200,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	35,138,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,340,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	10,115,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	20,683,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	25,300,000	0
JUMLAH			67,338,500	67,338,500

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 652081
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	62,000,000	62,000,000	0
2	Belanja	32,200,000	32,200,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	64,270,000	64,270,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	35,138,500	35,138,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21-JUL-25





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311
Telp. (0548) 23001 WhatsApp: +62 813-5125-6098 Email kantor.pabontang@gmail.com

SURAT PENGANTAR

NOMOR 376/SEK.PA.W17-A6/KU1.0.1/VII/2025

Kepada

Yth: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Samarinda

Di -

Samarinda

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Pengiriman: LK satker 652080 Semester I tahun 2025	1 (satu) Bundel	Disampaikan dengan hormat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Bontang, 30 Juni 2025

Sekretaris,

Yuri Adi Dharma, S.Kom

NIP. 19850117200604 1 001